



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN INDUSTRI
LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA (ILMATE) DAN
ASOSIASI-ASOSIASI**

**(BIDANG PERINDUSTRIAN, PARIWISATA, UMKM, EKONOMI KREATIF,
DAN SARANA PUBLIKASI)**

Rapat Ke	: 11
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Sidang	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari, Tanggal	: Rabu, 12 November 2025
Pukul	: 14.00 – 17.45 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP)
Sekretaris Rapat	: Eguh Setiawan., S.IP. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	: Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Nasional
Hadir	: Anggota Komisi VII DPR-RI: 16 orang dari 41 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi. Hadir Pemerintah: 1. Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI; 2. Asosiasi – Asosiasi: • The Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) • Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) • Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) • Gabungan Perusahaan Industri Elektronika Indonesia (GABEL)

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat

Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada pukul 15.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada hari Rabu, 12 November 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F. PDIP).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian RI mengenai kinerja sektor ILMATE Januari 2024 sampai dengan September 2025, termasuk profil subsektor, kondisi aktual, tantangan, dan kebijakan penguatan daya saing industri nasional.
2. Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari asosiasi-asosiasi sektor ILMATE, antara lain:
 - a. Industri Baja menyampaikan tantangan tingginya impor baja non-SNI dan praktik penyalahgunaan *HS Code 9406*. Diperlukan kebijakan penguatan pengawasan pra dan pasca impor, percepatan wajib sertifikasi SNI, serta penerapan harga gas industri yang kompetitif.
 - b. Industri Logam dan Mesin mengusulkan percepatan program revitalisasi industri mesin nasional, kemudahan akses pembiayaan investasi alat produksi, dan peningkatan kapasitas industri komponen lokal. Untuk industri katup oil dan gas nasional membutuhkan perlindungan Lartas terhadap produk katup impor.
 - c. Industri otomotif menekankan perlunya konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan program percepatan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB), peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk komponen utama otomotif dalam negeri, serta dukungan konkret pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik melalui pembangunan industri baterai nasional dan penyediaan infrastruktur pengisian daya di seluruh wilayah Indonesia. Industri otomotif juga menghadapi Kendala dengan maraknya import truk tanpa homologasi yang perlu ditegakkan. Disamping itu diperlukan penegakan hukum terhadap truk *Over Dimension Over Load* (ODOL) secara konsisten. Industri otomotif juga memerlukan insentif fiskal yang fair dan proporsional berbasis emisi dan TKDN.
 - d. Industri Elektronika dan Alat Listrik Rumah Tangga menyoroti tantangan banjir produk impor murah, perlunya insentif nonfiskal dalam bentuk memperluas penerapan TKDN secara fleksibel serta akselerasi revisi Permendag No. 16 Tahun 2025 bagi industri lokal dengan menerapkan Larangan dan Pembatasan (LARTAS).
3. Komisi VII DPR RI mendukung usulan dari asosiasi dalam peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan,

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan kementerian lainnya, yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan impor produk industri strategis yang tidak memenuhi ketentuan SNI wajib dan TKDN;
- b. Menindak tegas pelanggaran *HS Code*, *dumping*, dan penyalahgunaan asal-usul barang;
- c. Mengawal pelaksanaan TKDN dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran belanja pemerintah.
- d. Melakukan pelaporan rutin kepada Komisi VII DPR RI mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut kebijakan.

4. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian RI untuk:

- a. Menyusun roadmap penguatan sektor ILMATE yang terintegrasi dengan kebijakan hilirisasi nasional.
- b. Mempercepat implementasi TKDN dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN di seluruh subsektor ILMATE.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pengawasan impor dan perlindungan industri.
- d. Memperluas ruang lingkup industri penerima manfaat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan memastikan penerapan HGBT sebagaimana yang telah ditetapkan.
- e. Meningkatkan riset, inovasi, dan SDM industri untuk mendukung transformasi industri 4.0.
- f. Mendorong pengembangan industri hijau dan rendah emisi karbon sesuai target *Net Zero Emission* nasional.

5. Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk:

- a. Melakukan pengawasan ketat terhadap impor produk ILMATE;
- b. Memberikan insentif fiskal bagi industri berorientasi ekspor dan ber-TKDN tinggi;
- c. Menjamin ketersediaan energi industri dengan tarif kompetitif;
- d. Menyediakan fasilitas pembiayaan investasi untuk modernisasi alat produksi nasional.

6. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan:

- a. Melaksanakan Rapat Kerja/RDP dengan Menteri Perindustrian RI dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas kebijakan lanjutan sektor ILMATE;
- b. Melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke kawasan industri strategis.

- c. Menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pendalaman pada rapat-rapat panja daya saing industri dalam negeri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB.

**DIRJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ALAT TRANSPORTASI, DAN
ELEKTRONIKA (ILMATE)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI,**

TTD

Dr. SETIA DIARTA, MT.

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT,**

TTD

Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.